



III

Peran Raden Adipati Cokronegoro I dalam Perang Jawa di Bagelen Tahun 1825 – 1830 M

Hamam Munakul Aziz¹

¹ Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia; pahit35@gmail.com
Number telp:

Abstract

Raden Adipati Cokronegoro I merupakan salah satu tokoh penting dalam Perang Jawa (1825–1830) sekaligus figur sentral dalam pembentukan Kabupaten Purworejo. Perang Jawa adalah konflik besar antara pasukan pribumi yang dipimpin Pangeran Diponegoro melawan kolonial Belanda di bawah komando Jenderal de Kock. Dalam konflik tersebut, Cokronegoro I bersama Pangeran Kusumoyudho, atas perintah Sunan Pakubuwono VI, terlibat dalam perlawanan terhadap pasukan Diponegoro, khususnya di wilayah Bagelen yang berada dalam kekuasaan Kasunanan Surakarta. Keterlibatan ini dilatarbelakangi oleh upaya mempertahankan wilayah kekuasaan dari penjarahan pasukan Diponegoro, situasi yang kemudian dimanfaatkan oleh kolonial Belanda dalam strategi politik perang. Kajian ini berfokus pada kontribusi Cokronegoro I dalam Perang Jawa dengan menelaah latar belakang keikutsertaannya, peran yang dijalankan, serta dampak perang di wilayah Bagelen. Selain itu, penelitian ini menganalisis implikasi peristiwa tersebut terhadap lahirnya Kabupaten Purworejo pada tahun 1831 dengan pengangkatan Cokronegoro I sebagai bupati pertama, di tengah stigma masyarakat yang masih memandangnya sebagai tokoh berorientasi kolonial. Penelitian ini menggunakan pendekatan biografi dengan menelaah kepribadian tokoh, kekuatan sosial pendukung, konteks zamannya, serta peluang yang dimiliki. Teori peranan sosial Peter Burke dan metode historis yang meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi digunakan sebagai kerangka analisis.

Keywords

Raden Adipati Cokronegoro I; Perang Jawa; Bagelen

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Awal abad ke-19 merupakan periode transisi penting dalam dinamika politik dan sosial di Pulau Jawa. Setelah berakhirnya dominasi VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) serta peralihan otoritas dari kekuasaan Inggris kepada pemerintahan kolonial Belanda, wilayah Jawa mengalami transformasi yang signifikan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial umumnya berorientasi pada eksploitasi sumber daya lokal untuk kepentingan ekonomi Eropa, sehingga memunculkan perubahan mendasar dalam struktur sosial masyarakat serta tatanan pemerintahan lokal (Wahid, 2012).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Published By World Publishing Journal

Pemerintahan kolonial Hindia Belanda menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*), yakni pelaksanaan kekuasaan kolonial melalui perantara elite pribumi seperti bupati, adipati, dan kalangan priyayi lokal. Sistem ini dirancang tidak semata-mata untuk mempermudah proses pemungutan pajak dan pengendalian wilayah yang luas, tetapi juga untuk memperkokoh kedudukan para elite lokal selama mereka menunjukkan loyalitas terhadap otoritas kolonial (Manse, 2022).

Namun, kebijakan ekonomi yang diterapkan Belanda terutama sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang mulai dijalankan secara sistematis sejak dekade 1830-an sebenarnya telah dipersiapkan dan dimatangkan beberapa puluh tahun sebelumnya, termasuk pada masa pemerintahan Raffles dan periode awal kekuasaan Belanda setelah kekalahan Napoleon. Kebijakan ini berfokus pada eksploitasi hasil bumi Jawa untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional, khususnya komoditas seperti kopi, gula, dan padi. Akibatnya, kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan terdampak secara langsung. Rakyat mengalami penurunan kesejahteraan akibat beban pajak yang meningkat, praktik kerja paksa yang meluas, serta krisis ekonomi yang menimpa lapisan masyarakat bawah, terutama para petani. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama merosotnya taraf hidup penduduk Jawa pada masa itu (Sanata et al., 2014).

Keadaan sosial masyarakat Jawa semakin kompleks akibat perubahan budaya dan struktur sosial yang terjadi. Pada awal abad ke-19, kehidupan masyarakat Jawa masih kuat dipengaruhi oleh sistem feodal, di mana golongan bangsawan dan priyayi memegang kekuasaan serta memiliki akses sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan rakyat kebanyakan. Struktur feodal ini dipertahankan melalui hubungan patron-klien yang telah lama mengakar, namun situasinya semakin memburuk karena campur tangan pemerintah kolonial. Intervensi tersebut tidak hanya mengurangi kemandirian lokal, tetapi juga menimbulkan potensi konflik kepentingan di kalangan elite, maupun antara elite dan masyarakat bawah (Ayu et al., 2022).

Selain itu, ketidakseimbangan dalam struktur pemerintahan antara kekuasaan pusat (istana) dan daerah-daerah seperti Mataram, Kasunanan Surakarta, serta Kasultanan Yogyakarta turut memicu ketegangan. Pemecahan Mataram menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil setelah Perjanjian Giyanti (1755) dan Salatiga (1757) memberikan peluang bagi pemerintah kolonial untuk memperluas campur tangannya, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer. Dampaknya, kewibawaan dan legitimasi para penguasa Jawa semakin merosot di hadapan rakyat, sementara potensi munculnya gerakan perlawanan sosial-politik menjadi semakin besar (Ayundra & Mahardi, 2024).

Dalam situasi sosial-politik yang penuh gejolak tersebut, meletuslah Perang Jawa (1825–1830), yang dikenal pula sebagai Perang Diponegoro. Pertempuran ini tidak sekadar merupakan aksi militer menentang kekuasaan kolonial, melainkan juga cerminan dari akumulasi kekecewaan rakyat terhadap berbagai ketimpangan serta pelanggaran terhadap norma adat dan nilai-nilai keagamaan. Pangeran Diponegoro, sebagai tokoh utama, berhasil mempersatukan beragam lapisan masyarakat—mulai dari ulama, santri, petani, hingga priyayi kecil—dalam semangat perjuangan sosial, religius, dan pemulihan martabat bangsa Jawa (Nukman & Ayundasari, 2021).

Salah satu figur penting dalam dinamika lokal Bagelen pada masa Perang Jawa adalah Raden Adipati Cokronegoro I. Berasal dari keluarga bangsawan Jawa, ia dikenal sebagai bupati atau adipati pertama di wilayah Purworejo, yang pada masa itu masih termasuk dalam daerah Bagelen. Raden Adipati Cokronegoro I merupakan keturunan golongan kesatria dan memiliki hubungan kekerabatan dengan sejumlah elite keraton, khususnya di lingkungan Kasultanan Yogyakarta. Selain berperan sebagai pejabat pemerintahan, ia juga dikenal memiliki jaringan sosial dan politik yang luas di kalangan para pemimpin lokal di Jawa Tengah dan Kedu (P. B. R. Carey, 2022).

Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan peran Raden Adipati Cokronegoro I dalam dinamika Perang Jawa di Bagelen (1825–1830) serta eksistensinya pascakonflik dalam kerangka sosial-historis lokal, dapat menguraikan biografi dan perjalanan karier administratif Cokronegoro I sebelum, selama, dan setelah Perang Jawa dan menganalisis keterlibatan militer serta strategi perang gerilya yang dijalankan Cokronegoro I selama konflik. Pada dasarnya penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana eksistensi tokoh yang sering dianggap *Kolonial Sentris* (Cokronegoro I) eksis di dalam Perang Jawa.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode tersebut merupakan suatu cara untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu melalui proses pengujian serta analisis kritis terhadap data yang tersedia. Dalam penerapannya, metode penelitian sejarah meliputi empat tahapan utama, yaitu: pengumpulan sumber (heuristik), pemeriksaan atau pengujian sumber (verifikasi), penafsiran makna data (interpretasi), dan penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tulisan sejarah (historiografi). Untuk menghasilkan karya historiografi yang bermutu, diperlukan penerapan metode yang tepat dan terarah. Penulisan sejarah yang baik harus dilakukan secara sistematis dalam menyusun serta merekonstruksi peristiwa masa lampau. Keandalan data yang dikumpulkan harus benar-benar terjamin agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses penafsiran. Oleh karena itu, guna memperoleh hasil penelitian yang akurat, studi sejarah perlu melewati tahapan heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi) yang dilaksanakan secara objektif, bukan berdasarkan pandangan

subjektif (Rizqi Solikhah, 2023).

Heuristik merupakan tahap pengumpulan data, baik tertulis maupun lisan, yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menghimpun informasi dari berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel, dan dokumen lainnya. Sebagai langkah awal dalam penelusuran sumber sejarah, proses heuristik perlu dilakukan secara mendalam agar dapat mendukung fokus utama penelitian. Data yang dikumpulkan sebaiknya berupa sumber-sumber sejarah yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema atau topik yang dikaji, sehingga mampu memberikan dasar yang kuat bagi proses analisis dan penarikan kesimpulan (Arcinta et al., 2023). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Beberapa perpustakaan yang dijadikan sumber rujukan oleh penulis antara lain Perpustakaan Universitas PGRI Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Perpustakaan Museum Gajah di Jakarta.

Verifikasi merupakan tahap pengujian dan analisis data secara kritis. Proses kritik sumber dilakukan melalui dua jenis pendekatan, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal bertujuan memperoleh data yang valid, dan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang ada. Sementara itu, kritik eksternal tidak dilakukan karena tidak tersedianya sumber primer dalam data yang diperoleh. Kritik eksternal sendiri berfungsi menilai keaslian dan keabsahan suatu sumber, guna memastikan apakah dokumen tersebut otentik atau tiruan, serta layak dijadikan rujukan terpercaya. Adapun kritik internal berfokus pada penilaian terhadap isi sumber dengan meninjau konsistensi, ketepatan, dan kebenaran informasi yang disajikan, sehingga dapat menentukan kelayakan sumber sebagai dasar penulisan karya ilmiah (Purwanta, 2013).

Interpretasi merupakan proses penafsiran terhadap data yang telah melalui tahap verifikasi kebenaran. Tahapan ini memiliki peran penting karena berfungsi untuk menyusun kronologi peristiwa sejarah sehingga terbentuk konstruksi historis yang dapat dipertanggungjawabkan. Fakta sejarah pada dasarnya tidak memiliki makna tanpa adanya penafsiran manusia. Dalam penelitian sejarah, interpretasi menjadi langkah krusial yang berfokus pada pemaknaan sumber-sumber data yang telah dikumpulkan secara sistematis guna memperoleh fakta yang sah secara ilmiah. Proses ini tidak hanya melibatkan pembacaan atau pemahaman isi sumber, tetapi juga analisis mendalam terhadap konteks, makna, dan relevansi informasi yang ada. Melalui tahap interpretasi, peneliti berupaya mengaitkan data dengan permasalahan penelitian, mengungkap makna tersembunyi, serta menyusun gambaran sejarah yang logis dan koheren. Dengan demikian, interpretasi berperan sebagai penghubung antara data mentah dan pengetahuan sejarah yang terstruktur, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa masa lalu (Putri et al., 2024).

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai peristiwa menjadi satu kesatuan narasi yang utuh. Tahapan ini merupakan

bentuk penyajian hasil penelitian yang telah dilakukan, disusun berdasarkan sistematika pembahasan yang telah dirancang sebelumnya. Dalam proses penulisannya, setiap bagian diuraikan melalui deskripsi dan analisis dengan memperhatikan urutan kronologis peristiwa. Setelah melewati tahapan heuristik, kritik sumber, dan interpretasi secara sistematis, peneliti memasuki fase historiografi atau penulisan sejarah.

Pada tahap ini, kemampuan sejarawan dalam menguasai teori, metode, serta kecakapan analitis dan sintesis sangat menentukan kualitas karya yang dihasilkan. Historiografi tidak hanya menuntut ketelitian dalam penyusunan fakta sejarah, tetapi juga kepekaan dalam membangun narasi yang logis, koheren, dan argumentatif, sehingga dapat merepresentasikan peristiwa masa lalu secara ilmiah. Dengan demikian, keberhasilan dalam penulisan sejarah bergantung pada kemampuan sejarawan mengintegrasikan data, teori, dan metode menjadi sebuah konstruksi naratif yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Brought et al., 2015).

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Biografi Raden Adipati Cokronegoro I

Raden Adipati Aryo Cokronegoro, yang juga dikenal sebagai Raden Ngabei Resodiwiryo, berasal dari daerah Bagelen, yang termasuk dalam wilayah Mancanegara bagian barat Keraton Surakarta. Namun, berdasarkan struktur birokrasi Mataram pada masa Kerta dan Kartasura yang tercantum dalam Serat Pustaka Raja Purwa, Bagelen sebenarnya termasuk wilayah Negara Agung, tepatnya kelompok kelima atau daerah “sewu,” yang terletak di antara Sungai Bagawanta hingga Sungai Donan di Cilacap dengan jumlah 6000 cacah. Raden Ngabei Resodiwiryo merupakan putra sulung dari Raden Bei Singowijoyo, yang menjabat sebagai Mantri Gladhag, penjaga pintu gerbang (regol) di lingkungan Keraton Surakarta (Majid, 2023). Ia dilahirkan pada hari Rabu Pahing, tanggal 17 Mei 1779 Masehi, yang bertepatan dengan tahun Ehe 1708 Saka, di Desa Bragolan, wilayah afdeling Bagelen, yang kini termasuk dalam wilayah Kecamatan Purwodadi. Dengan demikian, Cokronegoro I merupakan tokoh yang hidup hampir sezaman dengan Pangeran Diponegoro, yang lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Dalam Babad Kedung Kebo, Cokronegoro kerap menyebut Diponegoro dengan sebutan “yayi” atau “adinda.”

Ayah Cokronegoro I diketahui berasal dari keluarga kentol, yaitu keturunan bangsawan atau priyayi lokal, yang berasal dari wilayah Bagelen. Ibu Cokronegoro, Nyai Ngabehi yang kemudian bergelar Raden Ayu Singowijoyo, memiliki garis keturunan yang lebih terhormat dibandingkan dengan suaminya. Raden Ayu Singowijoyo merupakan putri dari seorang kiai ternama, Kiai Cokroleksono, yang berasal dari Ngasinan, Kecamatan Banyuurip. Keluarga dari pihak ibu Cokronegoro telah menetap di sejumlah desa di sekitar wilayah Bagelen dan Kulon Progo. Selama lima generasi, mereka

mengabdikan diri sebagai pejabat, baik pada masa pemerintahan Kartasura 1680-1746 maupun Surakarta 1746–1830 (Qomar, 2022).

Peran Raden Adipati Cokronegoro I dalam Perang Jawa

Menurut Supriyono & Hartatik, (2020) Wilayah Bagelen, yang terletak di daerah subur di bagian selatan Jawa Tengah antara Sungai Progo dan Sungai Donan, sejak zaman dahulu dikenal sebagai bagian dari Kerajaan Galuh. Menurut Profesor Purbocaraka, kawasan ini dahulu disebut sebagai wilayah Pagaluhan, yang dalam bahasa Jawa disebut Pagalihan. Seiring waktu, nama Pagalihan mengalami perubahan menjadi Pagelen, dan akhirnya dikenal dengan nama Bagelen. Namun, sejak Perjanjian Giyanti 1755 tanah bagelen merupakan wilayah administrasi istana Kasunanan Surakarta. Ketika Belanda berupaya menguasai wilayah Bagelen sebelum terjadinya Perang Jawa, Patih Surakarta, Sosrodiningrat II yang menjabat pada 1812–1846, menegaskan kesediaannya untuk menyerahkan wilayah Banyumas dan daerah mancanegara bagian timur seperti Ponorogo, asalkan Bagelen tidak diserahkan. Hal ini karena apabila Bagelen lepas dari kekuasaan keraton, para bangsawan Surakarta akan kehilangan salah satu sumber utama penghidupan mereka.

Pertengahan Tahun 1825 meletuslah Perang Jawa, atau yang dikenal dengan Perang Diponegoro. Perang ini disebabkan oleh tiga hal yaitu: Pertama, Sejak awal tahun 1800-an, kekuatan kolonial telah berupaya menanamkan pengaruhnya di Jawa, terutama terhadap pemerintahan kerajaan yang masih berdiri. Upaya orang-orang Barat untuk mengubah berbagai aturan yang berlaku di lingkungan keraton sering kali mendapat penolakan dari kalangan bangsawan istana. Selain itu, kekuasaan para pangeran dan pejabat bangsawan pribumi semakin dipersempit melalui berbagai kebijakan yang merugikan mereka.

Kedua, pertentangan politik yang dipicu oleh kepentingan pribadi di dalam keraton semakin tajam seiring berjalannya waktu. Pengangkatan Hamengkubuwono V yang masih berusia muda memunculkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak dalam Dewan Perwalian yang dibentuk. Sekitar tahun 1822, muncul dua faksi di lingkungan istana: kelompok pertama terdiri atas Ratu Ibu (ibunda Hamengkubuwono IV), Ratu Kencono (ibunda Hamengkubuwono V), serta Patih Danuredja IV; sedangkan kelompok kedua beranggotakan Pangeran Diponegoro dan pamannya, Pangeran Mangkubumi (Rachman et al., 2023). Ketiga, beban berat yang ditanggung rakyat akibat penerapan pajak berlebihan membuat kondisi masyarakat semakin tertekan. Contohnya, setiap pintu rumah dikenai pajak *pacumpleng*, halaman rumah dikenai pajak *pengawang-awang*, bahkan setiap orang yang melintas di jalan beserta barang bawaannya juga diwajibkan membayar pajak. Situasi ini menyebabkan Pangeran Diponegoro memperoleh dukungan luas, tidak hanya dari kalangan elit istana, tetapi juga dari masyarakat pedesaan serta tokoh-tokoh agama yang merasa dirugikan oleh kebijakan kolonial tersebut.

Perang Diponegoro menyebar luas hingga ke berbagai wilayah di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Pangeran Diponegoro memperoleh dukungan dari beragam lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bangsawan, tokoh masyarakat, ulama, santri, hingga rakyat biasa. Untuk menghadapi perlawanan tersebut, pihak kolonial Belanda mendapatkan bantuan dari sejumlah penguasa lokal di berbagai daerah. Konflik ini pun meluas, tidak hanya terjadi di wilayah Yogyakarta, tetapi juga menjalar ke Surakarta, Banyumas, Tegal, Pekalongan, Parakan, Wonosobo, Panjer Roma, Bagelen, Semarang, dan Rembang.

Di wilayah Bagelen, muncul seorang tokoh yang berperan sebagai penasihat pribadi Pangeran Kusumayuda, komandan pasukan Surakarta yang dikirim ke Bagelen dan Banyumas untuk membantu pasukan Hindia Belanda melawan pasukan Diponegoro. Tokoh tersebut adalah Raden Ngabei Resodiwiryo, seorang Mantri Gladak dari Surakarta. Ia ditugaskan untuk menjadi penunjuk jalan di daerah Bagelen sekaligus mengoordinasikan perlawanan lokal terhadap laskar Pangeran Diponegoro. Di Bagelen sendiri, pengaruh Pangeran Diponegoro sangat besar dan mendapat dukungan luas dari masyarakat, sehingga kerap terjadi penyusupan di sepanjang aliran Sungai Bogowonto yang membuat situasi di wilayah tersebut semakin tidak stabil.

Pangeran Diponegoro, yang memperoleh dukungan dari sejumlah pangeran dan pejabat tinggi Keraton Yogyakarta, bangkit menentang berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi pada masa itu. Kekuatan serta pertahanan pasukannya tersebar di wilayah Sedayu, Kuwojo, Lugu, Karangduwur, dan Legis, dengan markas utama berlokasi di Legis yang dipimpin langsung olehnya. Dalam menghadapi perlawanan ini, pihak Belanda mengalami kesulitan besar dan hampir tidak mampu menandingi strategi perang gerilya yang diterapkan oleh pasukan Diponegoro. Kekalahan besar pihak Belanda terjadi pada hari Kamis Kliwon, 1 Jumadilawal 1168 Hijriyah atau 7 Januari 1823 Masehi, ketika sekitar 300 prajurit Diponegoro berhasil menghancurkan pos terdepan tentara Belanda di sebelah utara Brengkelan.

Susuhunan Paku Buwono VI kemudian memerintahkan Raden Ngabei Resodiwiryo untuk turut serta berperang di wilayah Bagelen dengan jabatan sebagai Senopati Pengamping. Tugasnya adalah menjadi penunjuk jalan bagi pasukan Surakarta sekaligus mendampingi Pangeran Kusumoyudo. Awalnya, Raden Ngabei Resodiwiryo menolak perintah tersebut dan mengusulkan agar tugas itu diberikan kepada putranya yang kedua, Ngabei Cokrodiwiryo. Namun, Susuhunan Paku Buwono VI tidak menyetujui usulan itu karena menganggap Ngabei Cokrodiwiryo belum cukup memahami kondisi wilayah Bagelen. Sebagai abdi yang setia, Raden Ngabei Resodiwiryo akhirnya menerima tugas tersebut dan bersama pasukan Keraton Surakarta berangkat menuju Tanah Bagelen. Sejak kedatangan bantuan pasukan Surakarta, posisi pasukan Pangeran Diponegoro mulai terdesak. Sebagai prajurit

sekaligus tangan kanan Pangeran Kusumoyudo, Raden Ngabei Resodiwiryo menunjukkan kemampuan luar biasa di medan perang dan memperoleh pujian dari pihak Keraton Surakarta.

Pada Januari 1829, Pangeran Kusumayuda dipulangkan ke Surakarta akibat perselisihan yang terjadi antara dirinya dan seorang perwira Belanda. Akibatnya, komando pasukan Jawa yang bertugas membantu pihak Belanda diserahkan kepada Raden Ngabehi Resodiwiryo, yang saat itu bergelar Tumenggung Cokrojoyo, di bawah pengawasan Kolonel Cleerens, komandan Belanda di wilayah Bagelen. Menjelang berakhirnya Perang Jawa, sebagai bentuk penghargaan atas jasanya dalam membantu menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro, pada 9 Juni 1830 Tumenggung Cokrojoyo atau Ngabehi Resodiwiryo diambil sumpahnya sebagai Bupati Brengkelan. Selanjutnya, pada 22 Agustus 1831, Gubernur Jenderal secara resmi mengeluarkan keputusan yang menentukannya sebagai bupati dengan gelar Raden Adipati Cokronegoro I (P. Carey, 2022).

Bagelen Pasca Perang Jawa 1825-1830 M

Sebagai salah satu konflik terbesar di Nusantara pada abad ke-19, Perang Jawa menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, menghancurkan struktur sosial dan ekonomi, serta meninggalkan luka mendalam di masyarakat. Secara strategis, perang ini membawa perubahan besar terhadap sistem pemerintahan di Jawa; banyak wilayah kehilangan kemandiriannya, sementara kedudukan para elite lokal setelah perang bergantung sepenuhnya pada loyalitas mereka terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bagelen, yang terletak di jalur strategis antara keraton-keraton Jawa dan wilayah pesisir selatan, memiliki peran penting dalam dinamika politik dan sosial abad ke-19. Pada awal abad tersebut, secara administratif Bagelen masih termasuk dalam wilayah Kasultanan Yogyakarta, sebelum kemudian berubah menjadi sebuah keresidenan di bawah kendali pemerintahan kolonial. Wilayah Bagelen pada masa itu mencakup kawasan yang kini meliputi bagian barat Purworejo, sebagian wilayah Kulon Progo, serta Wonosobo (Rochmiatun et al., 2023).

Bagelen dikenal sebagai daerah yang subur dan strategis, dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi serta hasil pertanian yang melimpah, khususnya padi, sehingga menjadikannya salah satu lumbung pangan penting bagi kerajaan-kerajaan di Jawa. Namun, sebagaimana wilayah Jawa lainnya, Bagelen juga menghadapi tekanan ekonomi akibat kebijakan kolonial yang memberlakukan pajak berat dan mengeksploitasi hasil bumi secara berlebihan. Struktur sosial masyarakat Bagelen terbagi menjadi tiga lapisan utama: kalangan priyayi, para petani, serta kelompok pendatang atau abdi dalem yang setia kepada pusat kekuasaan. Peran bupati dan adipati memegang posisi penting, baik sebagai perantara kebijakan pemerintah pusat maupun sebagai pengelola urusan masyarakat setempat. Sebagai pejabat administratif yang ditunjuk oleh kerajaan, para bupati pada masa transisi menuju kekuasaan kolonial juga harus menyesuaikan diri dan tunduk pada peraturan baru yang diterapkan

oleh Belanda. Kondisi ini sering menimbulkan benturan kepentingan antara elite lokal, pemerintah pusat (baik Kasultanan maupun Kasunanan), dan otoritas kolonial Hindia Belanda (Iswahyudi, 2020).

Sebelum pecahnya Perang Jawa, Bagelen merupakan wilayah yang menjadi persimpangan berbagai pengaruh politik, ekonomi, dan keagamaan. Kehidupan sosial masyarakatnya tergolong dinamis, ditandai oleh peran penting para tokoh kharismatik seperti kyai dan bangsawan lokal yang memberikan corak khas pada kehidupan setempat. Letaknya yang strategis dengan jaringan komunikasi dan aliran sungai besar menjadikan Bagelen mudah dijangkau, namun sekaligus rentan dimanfaatkan sebagai markas gerilya atau basis perlawanan oleh pasukan anti-kolonial. Salah satu tokoh penting dalam dinamika lokal Bagelen pada masa Perang Jawa adalah Raden Adipati Cokronegoro I. Ia dikenal bukan hanya sebagai pejabat pemerintahan, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki jaringan sosial dan politik yang luas di kalangan para pemimpin lokal di Jawa Tengah dan Kedu (Fatkhan et al., 2023).

Dalam berbagai sumber lokal, baik berupa babad maupun arsip kolonial, Cokronegoro I digambarkan sebagai sosok yang cerdas, berdedikasi, dan memiliki kemampuan unggul dalam bidang pemerintahan serta militer. Ia dikenal sebagai pelopor pembangunan wilayah Purworejo dan Bagelen, sekaligus tokoh yang berperan dalam proses modernisasi tata kelola pemerintahan lokal pada masa peralihan dari kekuasaan kerajaan ke pemerintahan kolonial. Berkat loyalitas dan kebijaksanaannya dalam menjalankan kepemimpinan, ia mampu mempertahankan posisinya sebagai kepala daerah bahkan setelah berakhirnya Perang Jawa sebuah pencapaian yang langka pada masa itu, mengingat banyak elite lokal lainnya tersingkir akibat keterlibatan mereka dalam konflik tersebut.

Dalam konteks Perang Jawa, Bagelen merupakan salah satu wilayah yang mengalami tingkat konflik paling intens. Kawasan ini menjadi medan pergerakan pasukan Diponegoro sekaligus sasaran operasi militer Belanda karena posisinya yang strategis dan berdekatan dengan pusat kekuatan Diponegoro di wilayah selatan Jawa. Sebagai pemimpin daerah, Raden Adipati Cokronegoro I menghadapi situasi yang sangat dilematis: di satu sisi ia harus memperhatikan aspirasi rakyat yang berpihak pada perjuangan Diponegoro, namun di sisi lain ia berada di bawah tekanan pemerintah kolonial yang menuntutnya menjaga ketertiban dan tetap menunjukkan loyalitas kepada Belanda (Birsyada, 2016a).

Baik sumber kolonial maupun babad lokal menggambarkan Cokronegoro I sebagai sosok yang luwes dan pragmatis dalam menghadapi dinamika Perang Jawa. Ia termasuk salah satu bupati yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan di tengah situasi perang yang penuh gejolak, dengan melakukan berbagai negosiasi dan manuver politik terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam beberapa keadaan, ia memilih untuk tidak secara langsung berkonfrontasi dengan pasukan Diponegoro, namun juga tidak menunjukkan penentangan terbuka terhadap pemerintah kolonial.

Strategi politik semacam ini oleh arsip kolonial sering disebut sebagai bentuk “politik dua muka,” tetapi dalam pandangan sejarah lokal, langkah tersebut dipandang sebagai wujud kecerdikan dan kemampuan Cokronegoro I dalam melindungi masyarakat serta wilayahnya dari kehancuran total (Hidayah & Birsyada, 2022).

Selain menjalankan perannya sebagai pengelola wilayah administratif, Adipati Cokronegoro I juga berperan aktif dalam menata ulang struktur wilayah serta memastikan keamanan logistik demi menjaga kelangsungan pemerintahan lokal. Ia menjalin komunikasi dengan Residen Kedu dan melakukan berbagai langkah diplomatik untuk mencegah meluasnya dampak perang di Bagelen dan daerah sekitarnya. Dalam sejumlah babad, Cokronegoro I digambarkan sebagai sosok yang mengutamakan keselamatan dan keberlangsungan hidup rakyatnya dibandingkan kepentingan pihak luar, baik dari kubu Diponegoro maupun pemerintah Belanda. Berbeda dengan banyak bupati atau pemimpin daerah lain yang terlibat langsung dalam Perang Jawa dan kemudian tersingkir atau dijatuhi hukuman oleh pemerintah kolonial, Raden Adipati Cokronegoro I justru berhasil mempertahankan posisinya setelah perang usai. Ia tetap menjabat sebagai bupati pertama Purworejo pada masa restrukturisasi administratif pasca-perang, ketika wilayah Bagelen secara bertahap berubah menjadi sebuah keresidenan resmi di bawah kendali pemerintahan kolonial Belanda (Birsyada, 2016).

Setelah berakhirnya perang, wilayah Bagelen mengalami perubahan besar dalam struktur sosial, politik, dan ekonominya. Pemerintah kolonial melakukan penataan ulang dengan membatasi atau bahkan mencabut kekuasaan para elite yang dianggap berpotensi berbahaya atau memiliki keterkaitan dengan gerakan perlawanan. Namun, Cokronegoro I justru mendapatkan kepercayaan berkat rekam jejak kepemimpinannya yang dinilai mampu menjaga stabilitas serta menunjukkan “loyalitas terbatas” terhadap pihak kolonial. Ia kemudian diangkat sebagai bupati pertama Purworejo dan diberi tanggung jawab untuk melakukan konsolidasi administratif di wilayah bekas Bagelen. Dalam sejumlah arsip kolonial, Cokronegoro I digambarkan memiliki kemampuan diplomasi yang baik dan dianggap sebagai mitra ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal (Pujiastuti et al., 2022).

Raden Adipati Arya Cokronegoro mulai menjabat sebagai Bupati Purworejo pada 31 Agustus 1830 M dan memimpin hingga tahun 1856. Perannya setelah Perang Jawa tidak hanya terbatas pada urusan birokrasi pemerintahan, tetapi juga meluas ke bidang pembangunan dan sosial. Ia dikenal sebagai tokoh pelopor dalam pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Purworejo, meliputi perbaikan sistem irigasi, penataan kembali permukiman penduduk, serta penggagas sistem perpajakan dan pencatatan administrasi yang lebih modern. Melalui berbagai program sosial dan ekonomi yang digagasnya, Cokronegoro I berperan besar dalam mempercepat proses pemulihan masyarakat pascaperang dan meletakkan dasar penting bagi kemajuan wilayah tersebut (Pratama, 2024). Dari perspektif sejarah lokal, keberadaan Cokronegoro I mencerminkan kesinambungan dan kemampuan

adaptasi elite pribumi Jawa pada masa transisi antara pemerintahan kerajaan dan kekuasaan kolonial. Ia bukan hanya berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat setempat sekaligus pelopor transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah eks-Keresidenan Bagelen. Keberhasilannya untuk tetap bertahan dan berperan aktif sebagai elite lokal setelah berakhirnya Perang Jawa menunjukkan kecakapan sosial dan politik yang jarang dimiliki oleh tokoh-tokoh sezamannya (Birsyada et al., 2018).

1. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini, yang berjudul “Peran Raden Adipati Cokronegoro I dalam Perang Jawa di Bagelen Tahun 1825-1830 M”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Raden Adipati Cokronegoro merupakan putra pertama dari pasangan Raden Ngabei Singowijoyo, yang berasal dari Desa Bragolan, dan Raden Ayu Singowijoyo, yang berasal dari Desa Ngasinan, Banyuwirip. Ia diperkirakan lahir sekitar tahun 1780. Beberapa sumber lokal mencatat tanggal kelahirannya sebagai 17 Mei 1776 M, bertepatan dengan bulan Ramadan tahun Ehe 1708, hari Rabu Pahing, di Desa Bagelen. Namun, sumber lain menyebutkan bahwa ia lahir di Desa Bragolan, distrik Jenar (Bagelen), pada hari Rabu Pahing, 17 Mei 1779 M.

Setelah Perjanjian Giyanti tahun 1776, wilayah Bagelen terbagi menjadi dua bagian kekuasaan, yaitu di bawah Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Namun, pembagian tersebut tidak berjalan mulus karena sering terjadi sengketa dan tumpang tindih batas wilayah antara kedua kerajaan. Seiring waktu, ketika Perang Diponegoro meluas hingga mencapai Bagelen, Kasunanan Surakarta diminta untuk membantu menjaga stabilitas di wilayah kekuasaannya di daerah tersebut. Sebagai tanggapan, Kasunanan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Kusumayuda dengan Cokronegoro bertugas sebagai senopati pendamping sekaligus penunjuk jalan bagi pasukan tersebut. Sejak kedatangan bantuan pasukan Surakarta, posisi pasukan Pangeran Diponegoro mulai terdesak. Sebagai prajurit sekaligus tangan kanan Pangeran Kusumoyudo, Raden Ngabei Resodiwiryo menunjukkan kemampuan luar biasa di medan perang dan memperoleh pujian dari pihak Keraton Surakarta.

Menjelang berakhirnya Perang Jawa, sebagai bentuk penghargaan atas jasanya dalam membantu menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro, pada 9 Juni 1830 Tumenggung Cokrojoyo atau Ngabehi Resodiwiryo diambil sumpahnya sebagai Bupati Brengkelan. Selanjutnya, pada 22 Agustus 1831, Gubernur Jenderal secara resmi mengeluarkan keputusan yang menentukannya sebagai bupati dengan gelar Raden Adipati Cokronegoro I. Raden Adipato Arya Cokronegoro mulai memerintah sebagai bupati Purworejo sejak 31 Agustus 1830 M sampai dengan 1856. Peran Cokronegoro I pasca Perang

Jawa tidak hanya terbatas pada aspek birokrasi pemerintahan. Ia juga dikenal sebagai tokoh pelopor pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Purworejo, mulai dari perbaikan irigasi, relokasi penduduk, hingga memprakarsai sistem perpajakan dan pencatatan administrasi modern. Berbagai program sosial dan ekonomi yang ia kembangkan turut mempercepat pemulihan masyarakat pascaperang dan menjadi fondasi penting bagi kemajuan daerah.

REFERENCES

- Arcinta, R., Putrajaya, G., Warsah, I., & Istan, M. (2023). Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan. *TIK Ilmieu Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 7(1), 117–126. <https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494>
- Ayu, D., Bhegawati, S., Agung, A., Purnami, S., Dian, M., Agustina, P., Denpasar, U. M., Warmadewa, U., & Indonesia, U. H. (2022). MONETARY ASPECT OF LINKAGE TO IMPROVE SOCIAL LIFE IN JAVANESE COMMUNITY. *Javanologi: International Journal of Javanese Studies*, 5(2), 1045–1051. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/javanologi.v5i2.67963> MONETARY
- Ayundra, N., & Mahardi, O. (2024). Sultan Hamengkubawana II and The Dutch In The Political Vortex of the Kasultanan Yogyakarta (1808-1811). *SWARNADWIPA Jurnal Kajian Sejarah Sosial Budaya Dan Pembelajarannya*, 8(2), 98–105. <https://doi.org/10.24127/sd.v8i2.3422>
- Birsyada, M. I. (2016a). Budaya Keraton Babad Tanah Jawi Dalam Perspektif Pedagogi Kritis. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 10(2), 124–135. <https://doi.org/oai:ojournal2.um.ac.id:article/124>.
- Birsyada, M. I. (2016b). Legitimasi Kekuasaan Atas Sejarah Keruntuhan Kerajaan Majapahit Dalam Wacana Foucault. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 311–332.
- Birsyada, M. I., Darsono, Siswanta, Sudartoyo, & Syahrurah, J. K. (2018). Historical Literatur As An Enculturation Of Education In Local Wisdom Of Kingdom Family In Java. *Jurnal HISTORIA*, 6(2), 321–332.
- Brought, H., Croce, B., Droysen, J., & Kuukkanen, J. (2015). *Representationalism and Non-representationalism* (Dalam Fils). Palgrave Macmillan US.
- Carey, P. (2022). Raden Saleh Syarif Bustaman (circa 1811-1880) and the Java War (1825-30) : A Dissident Family History. *Archipel Études Interdisciplinaires Sur Le Monde Insulindien*, 103, 87–126. <https://doi.org/10.4000/archipel.2927>
- Carey, P. B. R. (2022). Outsider Insiders Four Officers' Exile Conversations with Diponegoro, 1830–1837. *Jurnal Ilmu Humaniora Dan Ilmu Sosial Asia Tenggara*, 178(4), 440–476. <https://doi.org/10.1163/22134379-bja10045>
- Fatkhani, M., Abdurrahman, D., & Hak, N. (2023). Against Christianization: Socio-Religious Movements in Magelang after the Java War . *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(2 SE-Articles), 167–175.

- <https://doi.org/10.14421/esensia.v23i2.3924>
- Hidayah, S. N., & Birsyada, M. I. (2022). Peranan Ulama Muhammadiyah Dalam Pembentukan APS (Askar Perang Sabil) Di Yogyakarta Tahun 1947-1949. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 5(1), 81–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/historia.v5i1.34537>
- Iswahyudi. (2020). The Implementation of the Cultuurstelsel in Java : Cases in Afdeeling Demak and Grobogan , Central Java versus in Afdeeling Pacitan , East Java 1830-1870. *Britanian International of Humanities and Social Science Journal*, 2(3), 657–668. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/biohs.v2i3.316>
- Majid, R. A. (2023). DIASPORA DESCENDANTS OF SAYID ALWI DANUNINGRAT BASYAIBAN MAGELANG. *Jurnal Keislaman*, 6(1), 268–288. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3713>
- Manse, M. (2022). Compromise and adaptation in colonial taxation: Political economic governance and inequality in Indonesia. In *Manchester University Press*. Manchester University Press. <https://doi.org/10.7765/9781526166159.00019>
- Nukman, & Ayundasari, L. (2021). Strategi Diponegoro dalam menggerakkan semangat jihad masyarakat Islam di Jawa. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 1(3), 368–378. <https://doi.org/10.17977/um063>
- Pratama, R. (2024). Bupati or Regent ? Martanagara of Bandung 1893 – 1918. *Jurnal Lembaran Sejarah*, 20(1), 74–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.52633>
- Pujiastuti, T., Limbong, P. F., & Sudibyo. (2022). Serat Baron Sakendher dalam Pusaran Naskah Babad: Negosiasi Kultural Penguasa Jawa Pascaperang Diponegoro 1830. *Manuskripta*, 12(2), 281–304. <https://doi.org/10.33656/manuskripta.v12i2.214>
- Purwanta, H. (2013). EVALUASI ISI BUKU TEKS PELAJARAN SEJARAH PADA MASA ORDE BARU. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 31(3), 424–440. <https://doi.org/10.21831/cp.v0i3.1551>
- Putri, A. A., Nurjihan, F., Febriana, I., Sejarah, J. P., Sosial, F. I., Medan, U. N., & Utara, S. (2024). PENGEMBANGAN TEKS LAPORAN PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN HISTORIOGRAFI SEJARAH. *KOHESI: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(1), 15–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/kohesi.v5i1.1653>
- Qomar, A. S. (2022). *Banteng terakhir Kesultanan Yogyakarta : riwayat Raden Ronggo Prawirodirjo III dari Madiun, sekitar tahun 1779-1810* (C. Reinhart (ed.); Cetakan 1.). Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Yayasan Arsari Djojohadikusumo dan Pemerintah Kabupaten Madiun.
- Rachman, S., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (2023). Java War and the Social and Economic Impact. *Journal of Social Work and Science Education*, 4(2), 519–527. <https://doi.org/https://doi.org/10.52690/jswe.v4i2.398>
- Rizqi Solikhah, M. (2023). Pendekatan Sejarah Dalam Penelitian Pendidikan. *Ta'limDiniyah: Jurnal*

- Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(2 SE-), 79–102.
<https://doi.org/10.53515/tdjpai.v3i2.63>
- Rochmiatun, E., Maryam, M., & Gusela, N. (2023). Dampak perang Palembang dan dominasi kolonial Belanda terhadap perubahan sosial-ekonomi di Palembang pada abad XIX-XX. In *Cogent Arts & Humanities* (Vol. 10, Issue 1). Cogent. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2188775>
- Sanata, U., Yogyakarta, D., & Compag-, V. O. C. V. O. (2014). Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870. *Jurnal Ilmu Sosial*, 11(2), 163–172.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/socia.v11i2.5301>
- Supriyono, A., & Hartatik, E. S. (2020). NOBILITY AND LAND SYSTEM IN THE PRE-COLONIAL ERA OF THE SURAKARTA AND YOGYAKARTA KINGDOMS. *Paramita: Historical Studies Journal*, 30(2), 208–217. <https://doi.org/10.15294/paramita.v30i2.23692>
- Wahid, A. (2012). REVENUE FARMING AND IMPERIAL TRANSITION: AN ECONOMIC DIMENSION OF EARLY COLONIAL STATE FORMATION IN JAVA , C . 1800S-1820S. *HUMANIORA*, 24(3), 255–268.